



**PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DALAM MENGHADAPI PEMILU 2024
DI SMAN 1 CISARUA DESA LEUWIMALANG KABUPATEN BOGOR**

**BEGINNER VOTER PARTICIPATION IN 2024 ELECTIONS
AT SMAN 1 CISARUA, LEUWIMALANG VILLAGE
BOGOR REGENCY**

**Rahadi Budi Prayitno¹, Arlis Prayugo², Susiana Setianingsih³, Gede Wijaya Kusuma⁴,
Otti Ilham Khair^{5*}, Jovan Prima Firmansyah⁶, Wahyudi Pramono⁷**

^{1,2,3,4,5,6,7}Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara

¹rdipuro@gmail.com, ²arlisyugo@yahoo.com, ³ana_stip07@yahoo.com,

⁴gedewijayakusuma@gmail.com, ^{5*}otti.ilham1610@gmail.com, ⁶johnrightlead@yahoo.co.id,

⁷yudiwahyudi150569@gmail.com

Article History:

Received: March 22nd, 2023

Revised: March 10th, 2023

Published: April 20th, 2023

Abstract (English): This Community Service Activity (PKM) is in the form of socializing the importance of the participation of first-time voters for students of SMA Negeri 1 Cisarua, Leuwimalang Village, Bogor Regency in facing the 2024 general election. The purpose of this PKM is to increase the understanding of the younger generation, especially high school students, about political knowledge, to increase the participation and awareness of the younger generation and to educate the younger generation, especially first-time voters, about the importance of knowledge and political participation in particular. The implementation of this PKM activity was carried out through the socialization method, to students who already had the right to vote at SMA Negeri 1 Cisarua. Based on the results of the implementation of PKM activities, it was concluded that the existence of this PKM activity is increasingly increasing understanding of political participation, both in the election process and overseeing regional development.

Keywords: General Elections,
Political Participation,
Beginner Voters.

Abstrak

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berupa sosialisasi pentingnya partisipasi pemilih pemula untuk siswa/siswi sekolah SMA Negeri 1 Cisarua Desa Leuwimalang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dalam menghadapi pemilihan umum tahun 2024. Tujuan PKM ini untuk meningkatkan pemahaman generasi muda khususnya siswa SMA terhadap pengetahuan politik, untuk meningkatkan partisipasi serta kesadaran generasi muda dan untuk mencerdaskan generasi muda khususnya pemilih pemula akan pentingnya pengetahuan dan partisipasi politik khususnya. Pelaksanaan kegiatan PKM ini dilaksanakan melalui metode sosialisasi, kepada siswa/siswi yang telah memiliki hak memilih pada SMA Negeri 1 Cisarua. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PKM, disimpulkan bahwa dengan adanya kegiatan PKM ini adalah semakin meningkatnya pemahaman terhadap partisipasi politik, baik dalam proses pemilu maupun mengawal berjalannya pembangunan

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Partisipasi Politik, Pemilih Pemula.

PENDAHULUAN

Peran generasi muda dalam pemilu dapat menentukan arah demokrasi dan kemajuan bangsa. Hal ini ditunjukkan dengan konsennya para pihak pemangku (stakeholder) dalam membahas fenomena pemilih pemula dalam rangka mempengaruhi suara pemilu. Penjelasan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum, pada Bab I, Pasal 1, angka 16 berbunyi bahwa “Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin”. Terlihat demikian bahwa potensi pemilih pemula sangatlah besar. Peran generasi muda guna menentukan perjalanan dan perkembangan demokrasi bangsa sangatlah penting. Demokrasi merupakan modal dasar dalam pembangunan sistem ketatanegaraan Indonesia dengan corak masyarakat dan budayanya. Ini juga di dukung oleh pandangan yang diterima secara universal, bahwa demokrasi merupakan sistem politik dan sosial yang dapat mengakomodir perbedaan dalam sebuah negara.

Partisipasi warga negara tidak hanya sebatas bagaimana masyarakat memberikan hak suara mereka saat pemilihan umum berlangsung. Namun partisipasi juga termanifestasi dalam bentuk yang lebih luas, yakni, bagaimana publik terlibat dalam diskusi terkait hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, bagaimana mereka terlibat dalam proses pembuatan keputusan, berpartisipasi dan turut serta mengontrol pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang telah dibuat dan dilaksanakan

Laopran ini hanya membatasi pembahasan dalam aspek peningkatan peran partisipasi politik pemilih pemula sebagai bagian dari laporan hasil pengabdian kepada masyarakat menjelang pemilihan umum tahun 2024. Partisipasi politik merupakan terminologi yang selalu menarik untuk didiskusikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Hal ini terkait dengan fenomena bahwa partisipasi politik masyarakat mengalami dinamika yang sangat variatif. Terutama partisipasi pemilih muda usia aktif akademik, yaitu pada masa rentang usia sekolah dan perguruan tinggi.

Problematika partisipasi politik di Indonesia pasca-reformasi mengalami pasang surut. Meskipun banyak pihak yang menaruh harapan pada lahirnya partisipasi politik warga negara setelah lebih dari tiga puluh tahun hidup di era mobilisasi politik, nyatanya belum sepenuhnya dapat terwujud. Pemilihan umum tahun 2004 misalnya partisipasi pemilih hanya sebesar 84,1 persen turun dari pemilu tahun 1999 dengan tingkat partisipasi 92,6 persen. Angka partisipasi juga semakin menurun pada pemilu 2009 menjadi 70,9 persen dibarengi dengan peningkatan angka golongan putih atau warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 29,1 persen. Demikian pula dengan pemilu tahun 2014 yang hanya menyentuh angka partisipasi sebesar 70 persen (Ramadhanil et al, 2015). Sedangkan partisipasi pemilih pada tahun 2019 sebesar 82 persen.

Rendahnya partisipasi politik ini menjadi pekerjaan rumah yang mesti di selesaikan oleh pihak pemerintah, penyelenggara pemilu, dan organisasi non-pemerintah serta stakeholder yang berkepentingan dalam hal ini tentunya. Secara garis besar beragam faktor ditemukan sebagai penyebab orang enggan untuk berpartisipasi dalam politik, yaitu, rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik atau kandidat yang bersaing dalam pemilihan, menguatnya politik “imbal jasa” yang membuat orang-orang ikut memilih

jika diberikan sejumlah uang, masih rendahnya pengetahuan warga terkait hak berpolitik, melimpahnya informasi khususnya di media digital, banyaknya media partisan, serta membesarnya pembelahan politik. Terlebih para pemilih pemula terutama para siswa-siswi tingkat sekolah atas yang mereka menjadi pemilih pemula, tentu tanpa didukung oleh pengetahuan, pengalaman serta arahan yang cukup tentu suara mereka akan menjadi sia-sia tidak terakomodir dalam Pemilihan umum secara umum.

Menurunnya kualitas serta kuantitas partisipasi politik masyarakat dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman tentang isu-isu politik dan kejemuhan terhadap proses demokrasi yang tidak juga memberikan pengaruh singnifikan terhadap kualitas hidup warga negaranya. Bahkan tontonan praktek politik yang cenderung mengelabui dan bermain kotor yang senantiasa di suguhkan oleh media menjadi pertunjukan keseharian warga masyarakat untuk melihat perilaku para pejabat, politisi yang seringkali menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan serta bermasalah terhadap hukum. Hal demikian memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat yang tidak baik. Bawa masayarakat mendapatkan gambaran bahwa praktik bernegra dan politik itu adalah kotor. Sehingga memunculkan apatisme tersendiri bagi pengembangan partisipasi warga negara dalam kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara.

Masyarakat masih beranggapan bahwa sistem politik bukanlah urusan mereka, melainkan urusan pemerintah. Para aktor terpilih dianggap tidak benar-benar memperjuangkan nasib rakyat, namun justru memperkaya diri sendiri dengan menggunakan kekuasaannya. Hingga akhirnya, akumulasi kekecewaan terhadap realitas politik yang dirasakan kemudian mendorong terbentuknya sikap apatis politik (Yanuarti, 2016; Husna, 2019).

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pendidikan politik khususnya bagi kaum muda. Pendidikan politik atau yang sering disebut dengan political forming atau politische bildung ialah upaya pelibatan warga negara guna menciptakan budaya partisipasi (Holdar & Olha, 2002; Handoyo & Lestari, 2017; Istikharah & Asrinaldi, 2019). Melalui pendidikan politik, warga negara diberikan informasi sehingga terjadi proses transfer nilai dan norma meskipun mereka tidak bergabung ke dalam partai politik (Adelabu & Akinsolu, 2009; Sunatra, 2016; Handoyo & Lestari, 2017).

Adapun fungsi dan tujuan pendidikan politik sendiri diantaranya; (1) membangun kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam fungsi sosial dan politik; (2) membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik; (3) meningkatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan, tanggung jawab, dan etika tetang politik; serta (4) mendorong peningkatan kadar partisipasi politik aktif di tengah masyarakat (Affandi, 2011; Handoyo & Lestari, 2017).

Berdasarkan analisis situasi dan gambaran umum yang telah dipaparkan di atas, tim pengabdian masyarakat berbasis akademik ini bermaksud untuk memberikan pendidikan politik kepada kelompok pemilih pemula sebagai salah satu upaya guna menciptakan generasi muda yang rasional dan cerdas dalam membuat keputusan politik (Quinteller, 2007). Tidak dapat dipungkiri merekalah penerus sekaligus harapan bangsa dan kepada merekalah negara ini akan bergantung di masa depan. Adapun objeknya adalah siswa-siswi sekolah siswa/siswi SMA Negeri 1 Cisarua Desa Leuwimalang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Selatan dalam rangka memberikan pemahaman terhadap mereka atas partisipasi politik dalam proses pemilu maupun mengawal berjalannya pembangunan daerah.

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ialah, (1) menanamkan kesadaran berideologi, berbangsa, dan bernegara; (2) membangun kesadaran politik (political literacy); (3) meningkatkan minat pemilih pemula untuk berpartisipasi aktif dalam politik; serta (4) mengembangkan kecakapan partisipatoris yang mencakup tiga keahlian yakni keahlian berinteraksi, memantau isu publik, dan mempengaruhi kebijakan publik. Pada sisi lain, kegiatan ini sekaligus menjadi jembatan dunia bagi perguruan tinggi untuk memberikan kontribusi nyata di tengah masyarakat terutama pada generasi muda tingkat pertama dalam memasuki awal kehidupan sosial mereka.

METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diselenggarakan tanggal 26 Januari 2023 di SMA I Cisarua Desa Leuwiliang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. Kegiatan ini bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.

Kegiatan pengabdian ini menyasar generasi milenial sebagai upaya untuk menumbuhkan pengetahuan politik bagi generasi muda. Terlebih banyak anggapan pesimis yang ditabalkan kepada generasi milenial bahwa mereka adalah kelompok yang apatis, cuek, pesimis, dan antipati terhadap politik (Kharisma, 2015; Quaranta, 2016; Juditha & Darmawan, 2018). Kelompok sasaran ini sengaja dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut; (1) merupakan pemilih pemula; (2) termasuk dalam kategori pemilih yang sudah memiliki hak pilih namun masih terkategori massa mengembang (floating mass) yang rentan pengaruh money politik dan ajakan tidak memilih; (3) diasumsikan mempunyai animo partisipasi yang tinggi, namun tingkat kesadaran dan pengetahuannya masih tergolong rendah dan karenanya perlu diberikan pendidikan politik.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini berbasis partisipatif aktif dan interaktif dalam bentuk ceramah dan role playing disertai diskusi interaktif dan bedah kasus seputar kasus-kasus money politics, black campaign, dan lain sebagainya. Para peserta dibuat lebih santai dan atraktif dengan penyajian beberapa simulasi dan contoh-contoh kasus aktual terkait pendidikan politik yang baik bagi pemilih pemula. Metode ini diterapkan agar mampu menghasilkan serapan pengetahuan mengenai pendidikan politik yang mencedaskan dan mendorong terwujudnya iklim politik yang berkualitas di kemudian hari. Adapun untuk mengetahui perkembangan wawasan peserta, tim pengabdian kepada masyarakat akan memberikan pre-test sebelum dilakukan penyampaian materi. Kemudian saat memasuki tahap akhir, tim akan melakukan follow-up dengan melakukan post-test guna mengukur keberhasilan penyampaian materi pendidikan politik dalam kegiatan ini. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan ini ialah sebagai berikut; (1) peningkatan pemahaman akan hak dan kewajiban politik sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; (2) perubahan cara berfikir tentang situasi sosial dan politik di Indonesia; (3) peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai konflik yang kerap muncul menjelang masa pemilihan umum di Indonesia; serta (4) peningkatan minat partisipasi politik aktif di tengah masyarakat. Selain itu, peserta juga akan dimintai pendapatnya mengenai dampak positif yang dirasakan setelah mengikuti kegiatan ini termasuk memberikan saran dan masukan untuk kegiatan serupa di masa mendatang. Selain itu, para pemilih pemula juga diajak memainkan peran sebagai elemen-elemen yang terlibat dalam pemilihan umum melalui metode role playing. Para pemilih pemula dibagi ke dalam 8 kelompok dan diberi waktu untuk berdiskusikan dengan rekan-rekannya untuk menentukan satu pemimpin dari masing-masing

kelompok. Dalam sesi ini terlihat masing-masing kelompok memiliki pertimbangan khusus dalam menunjuk pemimpinnya. Pertimbangan tersebut meliputi aspek prestasi, kepemimpinan, public speaking, dan kepribadian. Hal ini bertujuan agar nantinya para pemilih pemula dapat memilih pemimpin dan calon anggota legislatif dengan cara yang cerdas, dan bukan terpengaruh dengan money politics dan negative campaign.

HASIL

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema “Sosialisasi Partisipasi Politik Pemilih Pemula DalamMenyambut Pemilu 2024” dimulai dengan pre-test kepada 60 peserta. Para peserta yang merupakan pemilih pemula diberikan kuesioner yang berisikan beberapa pertanyaan singkat yang mengenai hal Demokrasi, peran, hak dan kewajiban warga negara, serta kaitannya dengan keberadaan Partai Politik dan Pemilihan Umum, serta partisipasi politik warga negara.

Dari hasil pre-test tersebut, tim mendapatkan bahwa kesadaran dan pengetahuan politik para pemilih pemula masih tergolong rendah. Akan tetapi secara garis besar meski pemahaman mereka belum mendalam, para peserta mengetahui mengenai hak dan kewajiban warga negara, sistem politik di Indonesia, serta cara berpartisipasi dalam pemilihan umum.



Gambar 1. Foto Bersama Siswi SMAN 1 Cisarua

Sesi selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan pemberian materi mengenai pendidikan politik yang dipaparkan oleh tim pengabdian kepada masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN). Adapun materi yang diberikan dengan metode ceramah dalam kegiatan tersebut meliputi sebagai berikut :

Pertama – tama tim pemapar materi memberikan pemahaman awal terhadap sistem Demokrasi. Demokrasi telah lama dianggap sebagai sistem ideal sistem politik negara. Terutama dalam sebuah tatanan kenegaraan dengan sistem pluralitas budaya dan sosial kemasyarakatannya. Dalam sistem demokrasi, publik mempercayai bahwa mereka memiliki peran memegang kekuasaan tertinggi untuk mendistribusikan dan melegitimasi kekuasaan. Praktik legitimasi ini lazim dilakukan dalam sebuah pemilihan untuk mengakumulasi

kehendak dan cita-cita bersama warga negara.

Di Indonesia sendiri, sistem demokrasi telah lama menjadi cita-cita founding fathers yang menginginkan adanya pemerintahan berbasis pada kehendak rakyat. Sejak kemerdekaan Indonesia terwujud pada 17 Agustus 1945, demokrasi yang telah lama hidup dalam kesadaran diskursif para pendiri bangsa akhirnya termanifestasikan dalam kesedasaran praktis. Manifestasi asas demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia termaktub di dalam preamble UUD 1945 alenia ke empat yang menegaskan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat (Noviati, 2013).



Gambar 2. Foto Bersama Siswa SMAN 1 Cisarua

Kegiatan pendidikan politik yang berlangsung selama 180 menit ini berlangsung dengan lancar dan menyenangkan. Para pemilih pemula yang terlibatpun terlihat sangat antusias dengan tema-tema yang berikan selama kegiatan berlangsung. Seluruh materi yang disuguhkan oleh tim juga dapat diserap dengan baik. Hal ini terlihat dari hasil post test yang dilakukan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mengenai hak dan kewajiban politik warga negara, kondisi sosial dan politik bangsa, hingga peningkatan minat partisipasi politik aktif para pemilih pemula

PEMBAHASAN

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dalam upaya mewujudkan good government. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah akan selalu menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negaranya, oleh karena itu maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik tersebut. Bentuk partisipasi politik yang mungkin terjadi dalam keseharian adalah diskusi informal individu-individu dalam keluarga mereka masing-masing, di tempat bekerja mereka, atau semacam perkumpulan diantara sesama penghobi dan sahabat-sahabat permainan. Jelas bahwa diskusi-diskusi model ini variasinya banyak sekali dan dapat berkembang ataupun sesuai kondisi peminatan individu-individu tadi untuk berbicara mengenai politik dan negara. Tentu hal ini juga di dukung oleh faktor kondisi latar belakang, Pendidikan, pengalaman dan lain sebagainya yang mempengaruhi. Terlihat disini bahwa partisipasi warga sebenarnya sangat memungkinkan sekali untuk di upayakan

tumbuh secara positif.

Untuk itu penting kiranya semenjak dini menumbuhkan kesadaran partisipasi aktif warga negara mulai usia sejak dini diawali dari usia tingkat Sekolah Menengah Atas dalam rangka menanamkan kesadaran malui pemahaman peran mereka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu kiranya juga penting bagi Perguruan Tinggi mengambil peran ini, sebagai ujung tombah agen perubahan generasi muda, turut berpartisipasi aktif ambil peran dengan cara mengedukasi kepada segmentasi usia remaja di Tingkat Sekolah Menengah Atas ini. Tentu hal ini bisa di lakukan dengan melakukan Kerjasama, edukasi dan sinergi antara dunia Pendidikan dan para pelaku Dosen, Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mewujudkannya. Dan salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan Pengabdian Masyarakat oleh Perguruan Tinggi yang dialakukan dengan sekolah-sekolah.



Gambar 3. Diskusi dan Tanya Jawab Bersama Peserta Kegiatan

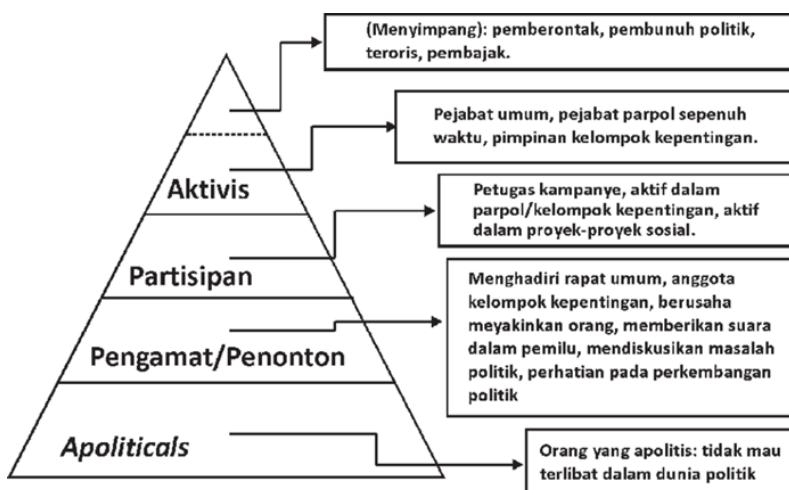
Partisipasi politik sendiri berasal dari bahas latin pars yang berarti bagian dan capere yang berarti mengambil peranan dalam aktivitas politik negara. Dan dalam Bahasa inggris partisipate atau participation memiliki makna mengambil peranan (Budiarjo, 2008). Sedangkan Michael Rush dan Althoff dalam bukunya Pengantar sosiologi Politik mengatakan bahwa keterlibatan seseorang dalam politik di tingkat derajat terendah adalah dimna aktifitasnya adalah memberikan suara di dalam pemilihan umum (Rush & Allhoff : 2010). Hal ini di utarakan pemateri kepada peserta didik adalah untuk membangkitkan kepada mereka bahwa mereka dapat berperan seminimal mungkin dalam praktek politik di kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan mendatangi kotak suara dan memberikan suaranya pada pemilihan umum 2024 mendatang.

Harapannya adalah tentu untuk menggugah kesadaran peran mereka untuk terlibat aktif dalam rangka mempengaruhi dan mengontrol kebijakan pemerintah secara aktif. Absennya kita atau golput dalam pemilihan umum tentu tidak akan memiliki dampak besar dan pengaruh signifikan dalam rangka mengontrol jalannya pemerintahan dengan kebijakan-kebijakan yang ditelurkan. Untuk itu dengan hal pemberian suara kita akan merasa tertantang dan terpancing mengontrol dan mengawal terhadap suara yang sudah kita delegasikan kepada wakil rakyat atau pejabat terpilih untuk bisa mempertanggung jawabakan suara yang kita berikan. Hal inilah yang dapat memicu partisipasi pemuda untuk sadar betul mengawal suara yang telah mereka berikan.

Oleh beberapa ahli, partisipasi politik didefinisikan sebagai warga negara biasa (private citizen) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Ada pula yang mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan sukarela (voluntary) dari warga masyarakat melalui cara mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembuatan atau pembentukan kebijakan umum (Huntington & Nelson, 1994, Budiarjo, 2008).

Sedangkan dari jenisnya, partisipasi politik dibedakan menjadi 4 macam. Pertama, apatis yakni orang yang menarik diri dari proses politik. Kedua, spector yakni rang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam ajang pemilihan umum. Ketiga, gladiator yakni mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik. Terakhir, pengkritik, yakni, orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Tujuan partisipasi politik sendiri diantaranya ialah, 1) memberikan kesempatan pada setiap warga negara untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan; 2) mengontrol pemerintahan yang akan terpilih; 3) sebagai alat untuk memilih pemimpin dan mengekspresikan eksistensi individu atau grup yang mempengaruhi pemerintah dengan jalan terlibat dalam politik; serta 4) melegitimasi rezim dan kebijakan pemerintah.



Gambar 4. Piramida Partisipasi Politik

Pada sesi selanjutnya, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif, bedah kasus, dan role playing. Metode ini dipilih agar mendorong partisipasi aktif dan perhatian yang lebih intens.

Dalam sesi diskusi interaktif, para pemilih pemula diajak menonton video dan dilanjutkan dengan diskusi mengenai konflik yang kerap muncul menjelang masa pemilihan umum di Indonesia layaknya isu SARA, money politics, hoaks, hingga black campaign. Hal ini bertujuan agar para pemilih pemula memperoleh gambaran-gambaran kasus dan langkah yang dapat mereka ambil ketika menghadapi hal tersebut. Sehingga akan melahirkan pemilih pemula yang cerdas dan rasional di kemudian hari.

Selain itu, para pemilih pemula juga diajak memainkan peran sebagai elemen-elemen

yang terlibat dalam pemilihan umum melalui metode role playing. Para pemilih pemula dibagi ke dalam 8 kelompok dan diberi waktu untuk berdiskusi dengan rekan-rekannya untuk menentukan satu pemimpin dari masing-masing kelompok. Dalam sesi ini terlihat masing-masing kelompok memiliki pertimbangan khusus dalam menunjuk pemimpinnya. Pertimbangan tersebut meliputi aspek prestasi, kepemimpinan, public speaking, dan kepribadian. Hal ini bertujuan agar nantinya para pemilih pemula dapat memilih pemimpin dan calon anggota legislatif dengan cara yang cerdas, dan bukan terpengaruh dengan money politics dan negative campaign.



Gambar 5. Pembicara pada kegiatan PKM

KESIMPULAN

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk memberikan informasi kepada generasi muda agar mereka memahami hak-hak politiknya. Dengan mengetahui hak-hak politik maka diharapkan mereka dapat berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan khususnya dalam proses politik. Di sisi lain kegiatan ini ditujukan untuk memotivasi generasi muda agar lebih melek politik dan selanjutnya menjadi agen yang mampu menggerakkan lingkungannya untuk berpartisipasi bersama sebagai warga negara.

Berdasarkan hasil kegiatan didapati bahwa masih terbatasnya pengetahuan generasi muda terhadap politik menyebabkan mereka cenderung hanya ikutikutan saat memilih. Dampak paling buruk dalam kondisi “buta” politik ini adalah mereka cenderung tidak mau terlibat dalam proses politik bahkan diskusi politik sekali pun. Padahal pengetahuan politik dibutuhkan agar mereka dapat mengawasi praktik penyelenggaraan pemerintah dan proses pembuatan kebijakan.

Kegiatan ini disadari memiliki beberapa kekurangannya dengan pendekatan dan metode yang dilakukan. Oleh karenanya, diharapkan adanya kebaruan metode dan konten agar informasi mengenai partisipasi politik, hak warga

PENGAKUAN

Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam mensukseskan kegiatan program pengabdian masyarakat ini, khususnya kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, Camat Cisarua dan Kepala

Sekolah SMAN 1 Cisarua Bogor sehingga kegiatan PKM ini berjalan dengan sukses dan lancar.

DAFTAR REFERENSI

- Adelabu, M. A., & Akinsolu, A. O. (2009). Political education through the university: A survey of Nigerian university students. *African journal of political science and international relations*, 3(2), 046-053.
- Affandi, I. (2011). *Pendidikan Politik: mengefektifkan Organisasi Pemuda Melaksanakan Pendidikan Politik Pancasila dan UUD 1945*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Aspinall, E. (2014). When brokers betray: Clientelism, social networks, and electoral politics in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 46(4), 545-570.
- Bawamenewi, A. (2019). Implementasi Hak Politik Warga Negara. *Warta Dharmawangsa*, (61).
- Budijanto, O. W. (2017). Pemenuhan Hak Politik Warga Negara Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Langsung. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3), 291-307.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cholisin, C. (2007). Karakteristik kewarganegaraan yang demokratis dalam perspektif demokrasi Pancasila. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 4(2).
- Dalton, R, Almond G, Powell, Stromp K. (2009). *Comparative Politics Today: A World View*, 9th edn. New York: Person Longman
- Handoyo, E. dan Lestari, P. (2017). *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Husna, A. (2019). Apatisme Politik Pemilih Pemula dan Paparan Drama Kasus Korupsi Di Layar Kaca. SOURCE: *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(2)
- Huntington, S. P., & Nelson, J. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Holdar, G. G., & Olha Z. (ed). (2002). *Citizen Participation Handbook People's Voice Project International Centre for Policy Studies*. Kyiv Ukraine: iMedia Ltd.
- Istikharah, dan Asrinaldi. (2019). Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Sebagai Penyelenggara Pemilihan umum Tingkat Ad Hoc. Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6 (2), 314- 328.
- Juditha, C., & Darmawan, J. J. (2018). Use of Digital Media and Political Participation Milenial Generation. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 22(2).
- Kelana, N. S. (2019). Pemilih pemula dan pentingnya dalam pemilu. Sieedo.Com. <https://siedoo.com/berita-19437-pemilih-pemula-dan-pentingnya-dalam-pemilu/>

- Kharisma, D. (2015). Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 1(7), 11-44.
- Latif, Y. (2016). *Yang Laju dan Yang Layu: Membumikan Agama Dalam Krisis Ruang Publik*. Bandung: Simbiosas Rekatama Media
- Latuconsina, N. (2013). Perkembangan Demokrasi dan Civil Society di Indonesia. *Jurnal Populis*, 7(2).
- Lim, M. (2013). Many clicks but little sticks: Social media activism in Indonesia. *Digital activism in Asia reader*, 127-154.
- Lim, M., & Kann, M. E. (2016). Politics: Deliberation, Mobilization and Networked Practices of Agitation. *Democracy: A reader*, 415-423.
- Mangune, I. O., Lengkong, J., & Lambey, T. (2017). *Partisipasi politik pemilih pemula melalui media sosial pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sangihe Tahun 2017*. Eksekutif, 1(1), 1–12.
- Maftuchan, A., Hoelman, M. B., & Fanggidae, V. (2016). *Transformasi Kesejahteraan: Pemenuhan Hak Ekonomi dan Kesehatan Semester*. Jakarta: Prakarsa & LP3ES.
- Magnis-Suseno, F. (2016). *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Noviati, C. E. (2016). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333-354.
- Nur Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>
- Quintelier, E. (2007). Differences in political participation between young and old people. *Contemporary politics*, 13(2), 165-180.
- Quaranta, M. (2016). An apathetic generation? Cohorts' patterns of political participation in Italy. *Social Indicators Research*, 125(3), 793-812.
- Prayudi, P. (2018). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Studi tentang Konsultasi Publik Masalah Pertambangan di Provinsi Bangka-Belitung dan Provinsi Kalimantan Timur). *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 7(1).
- Ramadhanil, F., Junaidi, V., Ibrohim. (2015). *Design Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu*. Jakarta: Kemitraan & Perludem.
- Rahman, A. (2018). Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula. *Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 44–51.
- Sirait, F. E. T. (2020). Ujaran Kebencian, Hoax dan Perilaku Memilih (Studi Kasus pada Pemilihan Presiden 2019 di Indonesia). *Jurnal Penelitian Politik*, 16(2), 179-190.
- Sunatra. (2016). *Pendidikan Politik Kewarganegaraan*. Bandung: LeKKaS.

- Susilo, M. E., Afifi, S., & Yustitia, S. (2020). Hoax as a Reflection on the Low Digital Literacy in Indonesia. *Revolution*, 4, 165- 174.
- Syafei, M., & Darajati, M. R. (2020). Design of General Election in Indonesia. *LAW REFORM*, 16(1), 97-111.
- Teorell, J. (2006). Political participation and three theories of democracy: A research inventory and agenda. *European Journal of Political Research*, 45(5), 787- 810.
- Thurston, A. (2015). *Right to information. Managing Records and Information for Transparent, Accountable, and Inclusive Governance in the Digital Environment: Lessons from Nordic Countries*. The World Bank, pág, 60.
- Utami, P. (2018). Hoax in modern politics: the meaning of hoax in Indonesian politics and democracy. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(2), 85-97.
- Voorhoof, D. (2015). Freedom of expression and the right to information: *Implications for copyright*. In *Research handbook on human rights and intellectual property*. Edward Elgar Publishing.
- Yanuarti, S. (2016). Golput dan pemilu di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 6(1), 21-32.
- Yoldaş, Ö. B. (2015). Civic education and learning democracy: their importance for political participation of young people. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 174, 544- 549.